



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.HH.PP.05.02- 28
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Terjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan

5 Juli 2018

Yth.
Pimpinan Kementerian/Lembaga
di
Jakarta

Dalam rangka mendukung program peningkatan kesejahteraan rakyat dengan peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui perkembangan dunia usaha dan investasi, di bidang politik, hukum, HAM dan keamanan dengan meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan. Pemahaman peraturan perundang-undangan salah satunya melalui penerjemahan resmi kedalam bahasa asing (bahasa Inggris).

Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 162 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini jumlah terjemahan resmi sesuai peraturan perundang-undangan belum sebanding dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan kerjasama Saudara, untuk segera memprioritaskan peraturan perundang-undangan yang akan diterjemahkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Yasonna H. Laoly

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

Lampiran Surat

Nomor : M.HH.PP.05.02 – 28
Tanggal : 5 Juli 2018
Hal : Terjemahan Resmi Peraturan
Perundang-undangan

1. Sekretariat Majelis Perwakilan Rakyat RI
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Ketua Mahkamah Agung
6. Ketua Mahkamah Konstitusi
7. Ketua Komisi Yudisial
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum
9. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
10. Ketua Badan Pengawas Pemilu
11. Gubernur Bank Indonesia
12. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
13. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
14. Menteri Bidang Perekonomian
15. Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16. Menteri Bidang Kemaritiman
17. Menteri Sekretaris Negara
18. Menteri Sekretaris Kabinet
19. Menteri Dalam Negeri
20. Menteri Luar Negeri
21. Menteri Pertahanan
22. Menteri Agama
23. Menteri Keuangan
24. Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi
25. Menteri Kesehatan
26. Menteri Sosial
27. Menteri Ketenagakerjaan
28. Menteri Perindustrian
29. Menteri Perdagangan
30. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Menteri Pekerjaan Umum
32. Menteri Perhubungan
33. Menteri Komunikasi dan Informatika
34. Menteri Pertanian
35. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
36. Menteri Kelautan dan Perikanan
37. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
38. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional
39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
40. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
41. Menteri BUMN
42. Menteri Koperasi usaha Kecil dan Menengah
43. Menteri Pariwisata

44. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45. Menteri Pemuda dan Olah Raga
46. Jaksa Agung
47. Kepala Polisi Republik Indonesia
48. Panglima TNI
49. Ketua Ombudsman RI
50. Kepala Staf Kepresidenan
51. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
52. Ketua Komnas HAM
53. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
54. Kepala Badan Intelijen Negara
55. Kepala BPJS Kesehatan
56. Kepala BPJS Ketenagakerjaan
57. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
58. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
59. Kepala Badan Kepegawaian Negara
60. Kepala badan Pusat Statistik
61. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
62. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
63. Kepala Badan Standardisasi Nasional
64. Kepala Badan Informasi dan Geospasial
65. Kepala Badan Narkotika Nasional
66. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
67. Badan Pengawas Obat dan Makanan
68. Kepala Badan SAR Nasional
69. Kepala Badan Keamanan Laut
70. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
71. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
72. Kepala Badan Ekonomi Kreatif
73. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
74. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
75. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi
76. Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
77. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
78. Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
79. Kepala Lembaga Ketahanan Nasional
80. Kepala Lemabaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
81. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
82. Kepala Lembaga Administrasi Negara
83. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
84. Kepala Arsip Negara Republik Indonesia
85. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia